



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 27 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, yang tata cara dan substansi materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dan pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance).

Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak atas segala dukungan dan kerjasamanya yang terbina selama ini sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas



Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEPALA DINAS

ANDI ABDURRAHMAN, SE., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005



DAFTAR ISI

SAMPUL (HALAMAN JUDUL)

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iv

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah 2

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD..... 3

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural..... 6

1.5. Inovasi 7

1.6. Penghargaan..... 9

1.7. Realisasi Keuangan 10

BAB. II CAPAIAN KINERJA A PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output..... 20

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome 33

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) 35

2.4. Capaian Indikator Komponen Otonomi Daerah 38

BAB. III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Dasar Hukum 40

3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan..... 40

3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan 40

BAB. IV PENUTUP 41

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya memandirikan Pemerintahan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan LPPD ini memuat Capaian Kinerja Makro, Kinerja Penyelenggaran urusan pemerintahan daerah, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta mengacu pada Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.



1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 Km². Terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 Km². Dan luas wilayah laut 9.146,66 Km². Dengan panjang garis pantai yaitu 670 Km.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada garis lintang -6,117331 dan garis bujur 120,462907 yang berlokasi di Jl. K.H. Dewantara No. 18, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. *Telepon (0414) 21028, FAX. 21732, Email : perindagkabselayar@gmail.com*

Gambaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar berikut ini



Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan, salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah

tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta perubahan nomenklatur.

Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan 2 (Dua) urusan pemerintahan di 2 (Dua) kementerian yakni urusan wajib, bidang urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan urusan pilihan, bidang urusan perdagangan.

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan, salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta perubahan nomenklatur.

Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

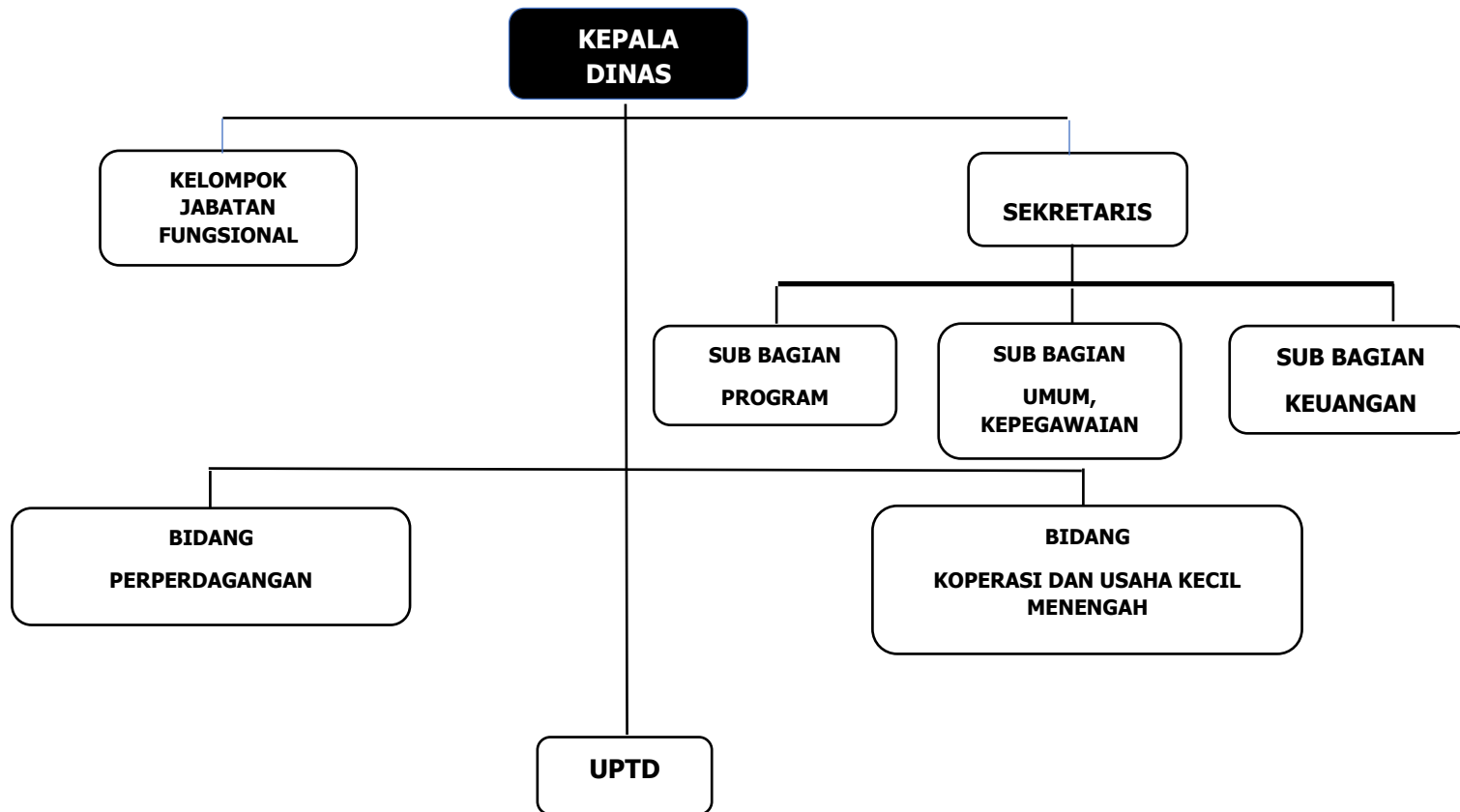


Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - 2. Sub Bagian Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perindustrian,
- d. Bidang Perdagangan,
- e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas



Gambar 1.2
Struktur Organisasi



1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Serta Jumlah Perjabat Struktural

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, untuk lebih jelas ada pada data terlampir.

- **Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO.	Pendidikan	PNS	PHL	Jumlah
1	S2	8 Org	-	8 Org
2	S1	13 Org	20 Org	33 Org
3	D.III	1 Org	-	1 Org
4	D.II	-	-	-
5	SMA	5 Org	12 Org	17 Org
6	SD	-	3 Org	3 Org
	Total	27 Org	35 Org	62 Org

- **Data Pegawai Berdasarkan Pangkat**

No	Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	2 orang
2	Pembina Tk. 1	0 orang
3	Pembina	3 orang
4	Penata Tk. 1	8 orang
5	Penata	4 orang
6	Penata Muda Tk. 1	6 orang
7	Penata Muda	2 orang
8	Pengatur Tk. 1	1 orang
9	Pengatur Muda Tk. 1	1 orang
Jumlah		27 orang

- **Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Dinas/Bidang/Seksi	Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
1	Kepala Dinas	1 Org	-	-	1 Org
2	Sekretariat	1 Org	5 Org	1 Org	7 Org
3	Perdagangan	2 Org	7 Org	1 Org	10 Org
4	Koperasi dan UKM	1 Org	3 Org	-	4 Org
5	UPT Pengelolaan Pasar	-	2 Org	-	2 Org
	Total	5 Org	17 Org	2 Org	24 Org

- **Jumlah Pejabat Struktural**

No	Dinas/Bidang/Seksi	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Org
2	Sekretaris	1 Org
3	Kepala Bidang	2 Org
4	Kepala Sub Bagian	3 Org
	Total	7 Org

1.5. Inovasi

	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	Tidak Ada	Tidak Ada	T	

Sampai saat ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM menggelar berbagai pelatihan bagi wirausaha pemula di Kabupaten Kepulauan



Selayar, Sulawesi Selatan. Pelatihan lebih difokuskan pada bidang *digital marketing*, desain produk, dan penciptaan produk yang *market oriented*.

Dengan melihat berkembang pesatnya pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga harus diikuti dengan peningkatan ekonomi masyarakat lokal dengan melahirkan para wirausahawan yang kreatif dan inovatif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga mendorong pelaku usaha membentuk sebuah wadah koperasi yang mengatasi kebutuhan anggotanya. Salah satu inovasi yang digagas adalah membentuk koperasi model di setiap kecamatan sebagai model koperasi sehat yang menjadi rujukan pengelolaan koperasi lainnya.

Adapun beberapa pelatihan yang diberikan diantaranya pelatihan Publik Speaking dan komunikasi Bisnis (30 Orang), Manajemen keuangan dan pengembangan usaha skala rumah tangga bagi pelaku UMKM (30 Orang), Perkenalan Aplikasi Keuangan Digital (Si APIK) (30 orang), Strategi Branding dan Digital Marketing (30 Orang), Pengembangan Usaha Mikro (Pelatihan pembuatan Roti) (40 Orang) dengan total peserta 160 Peserta UMKM se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas UMKM, dengan mendatangkan para ahli sebagai instruktur. Dalam pelaksanaannya, peserta bisa langsung praktek dengan didampingi instruktur. Sehingga, para peserta dapat langsung melakukannya setelah selesai kegiatan, para pelaku wirausaha harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk memacu produktifitas dan meningkatkan efisiensi usaha. Selain itu, Pelaku usaha juga harus jeli dalam melihat dan menangkap peluang usaha yang muncul seiring berkembangnya teknologi informasi para wirausaha jangan cepat berpuas diri dan tidak lagi berpatokan hanya *product oriented*, tetapi harus *market oriented*. "Artinya, harus bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan pasar saat ini dan akan datang".



1.6. Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Keterangan
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1.	Penghargaan sebagai Toko Penggerak Koperasi Pratama		Nasional			Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)	Acara Puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-77 Tahun 2024, di Kota Batam, Kepulauan Riau

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima Penghargaan sebagai toko Penggerak Koperasi Pratama di Bidang Koperasi Tingkat Nasional pada acara puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-77 Tahun 2024, di Ballroom Harmoni One Hotel dan Conventiom Center, Kota Batam Kepulauan Riau pada tanggal 12 Juli 2024. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Drs. Teten Masduki didampingi Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Prof. DR Hc. H.A.M Nurdin Khalid dan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad S.E.,M.M kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Andi Abdurrahman SE., M.Si serta anggota DPRD Selayar Muh.Aqsa Ramadhan.



Melalui piagam penghargaan ini hendaknya menjadi cambuk untuk meningkatkan daya saing koperasi dalam menghadapi persaingan yang makin ketat. Koperasi bukan hanya pilar ekonomi namun juga pilar bangsa maka perlu disosialisasikan di semua lapisan masyarakat.

Pada tahun ini Dinas, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berhasil menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar dari tahun sebelumnya sebesar Rp.236.152.800 menjadi Rp.354.003.700 dengan kenaikan sebesar 25,21%.

1.7. Realisasi Keuangan

Dana yang dianggarkan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk penyelenggaraan kegiatan berasal dari APBD tahun 2024, dengan total anggaran belanja sebesar Rp.9.582.031.121,- Terealisasi sebesar Rp.9.398.303.443,- atau 99,08% dengan sisa anggaran sebesar Rp.183.727.678,-

Tabel 3.3.1
Realisasi Keuangan Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
		Pagu	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan internal	Rp. 4.651.225.321	Rp. 4.498.526.793	96,72%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Rp. 21.492.200	Rp. 20.397.900	94,91%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	Rp. 2.585.200	Rp. 2.583.000	99,91
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Rp.1.371.500	Rp. 1.046.500	76,30



Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	Rp. 2.647.400	Rp.2.647.400	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Rp. 2.482.500	Rp. 2.482.500	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Rp. 2.738.500	Rp.2.738.500	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LPPD, Buku Profil)	Rp. 4.387.600	Rp. 4.300.000	98,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK)	Rp. 5.279.500	Rp. 4.600.000	87,13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 2.782.447.050	Rp. 2.723.187.371	98%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Rp. 2.755.114.700	Rp. 2.700.004.771	98,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 9.415.450	Rp. 9.300.000	98,77
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Rp. 9.999.200	Rp. 7.382.600	73,83



Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Rp. 6.917.700	Rp. 6.500.000	93,96
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun	Rp. 4.400.000	Rp. 4.200.000	95,45%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Rp. 4.400.000	Rp. 4.200.000	95,45
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan daerah yang tersusun	Rp. 175.000.000	Rp. 117.959.200	67,41%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Rp. 75.000.000	Rp. 43.524.600	58,03
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Rp. 85.000.000	Rp. 69.434.600	81,69
Pengolahan Data Retribusi Daerah		Rp. 15.000.000	Rp. 5.000.000	33,33
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp. 16.400.000	Rp. 16.301.500	99,40%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (DUK, KGB, KP, KP4) yang tersusun	Rp. 9.500.000	Rp. 9.458.400	99,56
Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen evaluasi kinerja ASN (SKP, DP3) yang tersusun	Rp. 6.900.000	Rp. 6.843.100	99,18
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	0	0	0



Administrasi Umum Perangkat Daeah	Persentase Kelancaran Adminstras dan Operasional Perkantoran	Rp.636.044.300	Rp. 635.556.300	99,92%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Rp. 97.105.900	Rp. 96.790.300	99,67
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan (spanduk) yang tersedia	Rp. 67.058.400	Rp. 67.057.000	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Rp. 17.442.000	Rp. 17.270.000	99,01
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Perindag KUKM yang tersusun	Rp. 454.439.000	Rp. 454.439.000	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	Rp. 236.026.171	Rp. 207.175.020	87,78%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang disediakan	Rp. 17.345.000	Rp. 17.345.000	100%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit)	Rp. 218.681.171	Rp. 153.247.000	70,08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	Rp.600.825600	Rp. 599.834.502	99,84%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Rp. 7.500.000	Rp. 7.304.900	97,40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Rp. 435.360.000	Rp. 435.000.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah	Rp. 179.590.000	Rp. 173.915.000	96,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Rp. 111.650.000	Rp. 106.450.000	95,34
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Rp. 28.990.000	Rp. 28.515.000	98,36
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Rp. 108.300.000	Rp. 108.300.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp. 38.950.000	Rp. 38.950.000	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN				
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	52,058,200	52,058,200	100
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	52,058,200	52,058,200	100
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian	52,058,200	52,058,200	100



	kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)			
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok barang Penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)	Rp. 1.935.516.700	Rp. 1.900.423.800	98,19
Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau	Rp. 54.794.700	Rp. 23.648.800	43,16
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	Rp. 54.794.700	Rp. 23.648.800	43,16
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan	Rp. 1.880.722.000	Rp. 1.876.775.000	99,79
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Rp. 180.710.200	Rp. 179.913.100	99,56
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Rp. 1.700.011.800	Rp. 1.696.861.900	99,81



Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Rp. 131.752.900	Rp. 131.647.000	99,92
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan	Rp. 131.752.900	Rp. 131.647.000	99,92x
Misi Dagang Bagi Ekpor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	Rp. 131.752.900	Rp. 131.647.000	99,92
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (2)	Persentase alat ukur yang ditera	74.678.000	74.290.500	99,48
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alat UTTP bertanda tera SAH yang berlaku	74.678.000	74.290.500	99,48
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	74.678.000	74.290.500	99,48
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase produk lokal yang dipasarkan	0	0	0
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Jumlah prasarana yang digunakan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	0	0	0
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	25.000.000	25.000.000	100



Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang diperiksa dan diawasi	25.000.000	25.000.000	100
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	25.000.000	25.000.000	100
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan(%)	360.000.000	360.000.000	100
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	360.000.000	360.000.000	100
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Naik Kelas	360.000.000	360.000.000	100
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Rp. 1.411.800.000	Rp. 1.411.795.000	100
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	100



Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	Rp.1.295.000.000	Rp.1.295.000.000	100
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Rp.91.800.000	Rp.91.800.000	100
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	Rp. 940.000.000	Rp. 939.935.950	99,99%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT)	Rp. 940.000.000	Rp. 939.935.950	99,99%
Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produk dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain dan teknologi	Rp. 940.000.000	Rp. 939.935.950	99,99%

Secara umum anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari tiga sumber yaitu APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, APBD Propinsi Sulawesi Selatan dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kontribusi pendapatan dibidang Perdagangan melalui retribusi pasar dan layanan tera/tera ulang.



1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.3.2

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

No	Sumber	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Reribusi Pelayanan Pasar	500.000.000	354.003.700	70,80
2.	Layanan Tera/Tera Ulang	-	-	-
	Jumlah	500.000.000	354.003.700	70,80

2. Belanja

Tabel 3.3.3

Rekapitulasi Belanja Tahun 2024

Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
Belanja Operasi	9.364.029.950	9.245.056.443	118.973.507	98,7
Belanja Modal	218.001.171	153.247.000	64.754.171	70,29
Surplus/(defisit)	9.582.031.121	9.398.303.443	183.727.678	99,08

BAB II
CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Perdagangan	484.	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :					
			a. Pusat Perbelanjaan	Jumlah izin pusat perbelanjaan Yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja X 100 % Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	$\frac{640}{640} \times 100$	100	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Pendukung



			b. Toko Swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang di terbitkan ≤ 5 hari kerja $\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang di terbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{100 \%} \times 100$ Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	$\frac{9}{9} \times 100$	100	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Pendukung
		487.	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja $\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100 \%$	-	-	Bidang Perdagangan	Tidak ada pengajuan permohonan untuk penerbitan TDG pada tahun 2023
		488.	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG $\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di kab. kota}} \times 100 \%$	-	-	Bidang Perdagangan	Tidak ada pengajuan permohonan untuk penerbitan TDG pada tahun 2023
		489.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :					



			a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit $\leq$ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$ Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dlm negeri	-	-	Bidang Perdagangan	Belum ada penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
			b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit $\leq$ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$	-	-	Bidang Perdagangan	Belum ada penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri



				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dlm negri				
			c. Penerima waralaba lanjutan	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit $\leq$ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar $\frac{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dluar negeri}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dlm negri}} \times 100 \%$	-	-	Bidang Perdagangan	Belum ada penerima waralaba lanjutan
		490.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan	-	-	Bidang Perdagangan	Belum ada fasilitas pembiayaan bahan berbahaya dan



			pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab./Kota	$\frac{\text{distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab kota}}{\text{Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}} \times 100$ %				pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota
		491.	Persentase penerbitan SKPA yang tepat waktu		-	-	Bidang Perdagangan	Belum ada permohonan untuk perbitan SKA
		492.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distrubsi perdagangan di wilayah kerjanya.	$\frac{\text{Pengelolaan Dibina}}{\text{Jumlah keseluruhan pengelola pasar}} \times 100$ %	$\frac{38}{38} \times 100$	100	Bidang Perdagangan	Aku Bukti Pendukung
		493.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomodfitas bahan pokok		-	Bidang Perdagangan	Aku Bukti Pendukung



		495.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun 2024}}{100 \%} \times \text{Jumlah potensi UTTP yang wajib di tera dan ditera ulang di Kab. Kep. Selayar}$	$\frac{367}{630} \times 100$	58,25	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Pendukung
		496.	Persentase kesesuaiannya BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku}}{100 \%} \times \text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}$	$\frac{24}{24} \times 100$	100	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	372.	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{100 \%} \times \text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}$	-	-	Bidang Koperasi dan UKM	Koperasi yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya sebagai persyaratan pengurusan IUSP
		373.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam}}{100 \%} \times \text{Jumlah permohonan atau pengajuan yang masuk}$	-	-	Bidang Koperasi dan UKM	Koperasi yang berdomisili di daerah belum memungkinkan untuk membuka kantor cabang. (belum memenuhi syarat)



		374.	Persentase Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa}}{100 \% \text{ Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100$	$\frac{19}{177} \times 100$	10,73	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		375.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh kopeasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{6}{177} \times 100$	3,38	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		376.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{12}{177} \times 100$	6,77	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		377.	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah	Jumlah anggota koperasi yang	$\frac{12}{177} \times 100$	6,77	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung



			mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / Kota	$\frac{\text{mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$				
		378.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	-	-	Bidang Koperasi dan UKM	Belum ada koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
		379.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	-	-	-	Tidak perlu diisi
		380.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi	Jumlah Koperasi yang diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	-	-	Bidang Koperasi dan UKM	Tidak ada Penerbitan NIK untuk Tahun 2024



			(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang ada}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$				
		381.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	$\frac{1}{177} \times 100$	0,56	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung.
		382.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	$\frac{4}{177} \times 100$	2,25	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		383.	Persentase koperasi yang diberikan					



			dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ % Jumlah koperasi yang ada	$\frac{148}{177} \times 100$	83,61	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		384.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan $\frac{\quad}{\quad} \times$ 100 % Jumlah koperasi yang ada	$\frac{1}{177} \times 100$	0,56	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		385.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$ Jumlah wirausaha yang ada	$\frac{87}{19.398} \times 100$	1,69	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		386.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system Online	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam Sistem Data Online (ODS)	$\frac{5132}{19.398} \times 100$	26,45	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung



			Data System (ODS)	$\frac{\text{---}}{100\%} \times \text{Jumlah usaha mikro yang ada}$				
		387.	Persentase jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{100\% \text{ Jumlah usaha mikro yg ada}} \times 100$	$\frac{100}{19.398} \times 100$	0,51	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		388.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang ada}} \times 100\%$	$\frac{552}{19.398} \times 100$	2,84	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		389.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{100\% \text{ Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100$	$\frac{36}{552} \times 100$	6,52	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung



		390.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{100\% \text{ Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100$	$\frac{160}{19.398} \times 100$	0,80	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		391.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\% \text{ Jumlah usaha mikro yg ada}} \times 100$	$\frac{12}{19.398} \times 100$	0,06	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung



2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan berdasar Indikator Kinerja Kunvi Hasil/Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Perdagangan	97.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten / kota}} \times 100 \%$	$\frac{2.629}{19.398} \times 100$	13,55	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Pendukung
		99.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera SAH yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan	$\frac{367}{630} \times 100$	58,25	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Dukung



				$\frac{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera ulang di wilayah kabupaten kota (2024)}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera ulang di wilayah kabupaten kota (2024)}} \times 100 \%$				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100 \%$	$\frac{23}{148} \times 100$	15,54	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung



		75.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100 \%$	$\frac{87}{19.398} \times 100$	0,44	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
--	--	-----	---	--	--------------------------------	------	-------------------------	---------------------

2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023-2024**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2023		2024		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,85	8,08	7,87	8,30	
2	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	%	100,00	1232	100,00	100	



3	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	%	100,00	100	100,00	100	
4	Persentase jenis komoditi yang dipantau	%	100,00	68,42	100,00	86	
5	Persentase peningkat jumlah komoditi ekspor	%	100,00	20,58	100,00	66,6	
6	Persentase alat ukur yang ditera	%	100,00	39,85	100,00	75,2	
7	Persentase produk lokal yang dipasarkan	%	100,00	30	100,00	100	
8	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	%	100,00	100	100,00	0	Untuk Tahun 2024 tidak ada dikarenakan permenkop mengeluarkan aturan terkait izin usaha simpan pinjam harus memiliki modal awal minimal 500 juta
9	Persentase koperasi sehat	%	100,00	19,7	100,00	16,89	
10	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	%	100,00	81,82	100,00	100	
11	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	%	100,00	17,27	100,00	20,19	



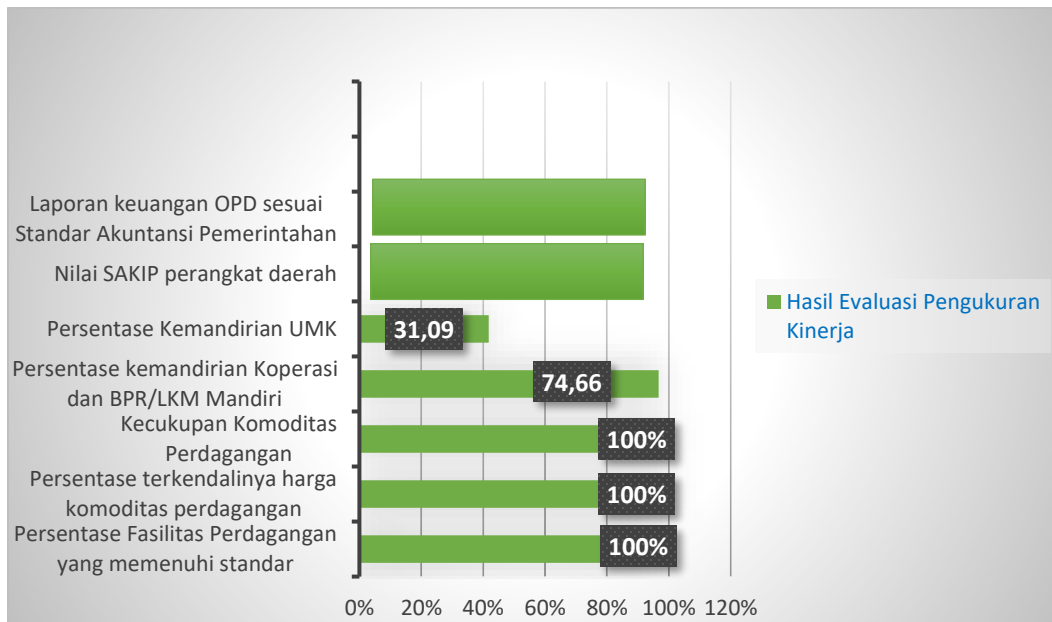
12	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	%	100,00	100	100,00	100	
13	Persentase UMKM yang Diberdayakan	%	100,00	57,43	100,00	83,12	
14	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100,00	52,75	100,00	69,82	



2.4 Capaian Indikator Komponen Otonomi Daerah

Tabel 2.3.1.

Hasil terhadap analisis capain Kinerja



Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

1. Target dan Realisasi Kinerja

Dari Indikator-Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan rata-rata capaian realisasi di rinci pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Urusan Bidang Perdagangan						
I	Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan					
	a. Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar	%	68,75	68,96	100	
	b. Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan	%	18	18	100	
	c. Kecukupan Komoditas Perdagangan	%	100	100	100	
Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah						
II.	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha					
	a. Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri	%	22,46	16,77	74,66	
	b. Persentase Kemandirian UMK	%	5,50	1,71	31,09	
III.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah					
	a. Nilai SAKP perangkat daerah	Nilai	70			Belum Di Review
	b. Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai		



BAB III

3.1. Dasar Hukum

3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan

3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Pada tahun 2024 tidak ada tugas pembantuan yang diberikan dari kementerian perdagangan dan kementerian koperasi dan UKM.

1. Target Kinerja

2. Realisasi Kinerja

3.4. Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan tugas Pembantuan dan Penugasan

Tidak terdapat permasalahan ataupun hambatan karena pada tahun 2024 tidak terdapat tugas pembantuan.

3.5. Saran dan Tindak Lanjut



BAB IV

PENUTUP

Demikian *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 Unit Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar*, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kinerja instansi di masa datang.

Semoga keinginan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab dapat dicapai

